

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1.1. Permukiman

1.1.1. Pengertian Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.4 tahun 1992 adalah sebagai suatu kelompok yang memiliki fungsi lingkungan tempat hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Menurut Koestoer (1995) batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Definisi permukiman berdasarkan Kamus Tata Ruang tahun 2007 permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan. Permukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap. Permukiman di dalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu :

- a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- b. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap.

Parwata (2004) menyatakan bahwa permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya.

Menurut Parwata (2004) permukiman terdiri dari:

- a. Isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat
- b. Wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia.

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa permukiman merupakan suatu kawasan yang tidak hanya digunakan

sebagai wadah untuk bertempat tinggal melainkan juga wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar sesama. Permukiman itu tidak hanya terletak di perkotaan melainkan juga di pedesaan yang dilengkapi juga dengan sarana prasarana yaitu tempat peribadatan atau pemerintahan seperti halnya Desa Bejiharjo.

1.1.2. Elemen Permukiman

Dua elemen permukiman tersebut, selanjutnya dapat dibagi ke dalam lima elemen yaitu:

- a. Alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan iklim
- b. Manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara, temperatur, dsb), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral
- c. Masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan administrasi
- d. Fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi
- e. Jaringan (*network*) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi,

sistem manajemen kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.

Dalam pengertian permukiman sendiri telah dijelaskan bahwa permukiman mengandung wadah untuk bertempat tinggal dan dilengkapi dengan sarana prasarana. Sarana prasarana tersebut akan mendukung kegiatan berinteraksi antar warga yang menjadi pelaku kegiatan pada permukiman. Sebagai contoh adanya balai desa, lapangan maupun masjid dapat dijadikan tempat berkumpul warga jika ingin mengadakan sebuah acara. Pada Desa Bejiharjo terdapat sarana prasarana yang memadai sehingga unsur-unsur permukiman tersebut dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung satu sama lain demi keberlangsungan permukiman.

1.2. Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Menurut Bintarto (1983), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kartohadikusumo (1965) desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur daerah, berupa tanah produktif dan tidak produktif, serta unsur lokasi, luas dan batas.
- b. Unsur penduduk berupa jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk.
- c. Unsur tata kehidupan berupa seluk-beluk masyarakat desa (Bintarto, 1977).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum tempat tinggal masyarakat yang mempunyai kekhasan tertentu berupa kultur adat istiadat setempat dan dipimpin oleh pemerintahan terendah di bawah camat. Desa Bejiharjo sendiri memiliki kekhasan dan kultur yang dapat membentuk masyarakat desa sejak dulu. Adat istiadat yang masih cukup kental ada pada desa itulah yang membuat perbedaan dengan kehidupan perkotaan.

2.2.2. Penggunaan Lahan di Wilayah Pedesaan

Menurut Sudyohutomo (2006), di Indonesia, klasifikasi penggunaan lahan mencakup baik yang sengaja digunakan oleh manusia

(*land use*) maupun tidak digunakan (*unused*). Klasifikasi jenis penggunaan tanah pedesaan ada 12 jenis, antara lain:

- a. Perkampungan adalah areal lahan yang digunakan untuk kelompok bangunan tempat tinggal penduduk dan dihuni secara menetap.
- b. Industri adalah areal lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau setengah jadi menjadi barang jadi (industri manufaktur).
- c. Pertambangan adalah areal lahan yang dieksploitasi bagi pengambilan atau penggalian bahan-bahan tambang yang dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.
- d. Persawahan adalah areal pertanian terdiri dari petak-petak pematang yang digenangi air secara periosik atau terus menerus, ditanami padi atau diselingi dengan tanaman palawija, tebu, tembakau, dan tanaman semusim lainnya.
- e. Pertanian tanah kering semusim adalah areal lahan pertanian yang tidak pernah diairi dan mayoritas ditanami dengan tanaman umur pendek, areal ini juga disebut pertanian tegalan atau ladang
- f. Kebun adalah areal lahan yang ditanami satu jenis tanaman keras (disebut kebun sejenis), atau tanaman keras dengan tanaman semusim dan tidak jelas jenis tanaman apa yang menonjol (sehingga disebut kebun campuran)

- g. Perkebunan adalah areal lahan yang ditanami tanaman keras dengan satu jenis tanaman dominan, yang mencakup perkebunan berdasarkan perkebunan rakyat.
- h. Padang adalah areal lahan yang hanya ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga rumput dan semak.
- i. Hutan adalah areal lahan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tajuk pohonnya dapat saling menutupi/bergesekan. Hutan terdiri atas hutan alam lebat, hutan belukar, dan hutan sejenis.
- j. Perairan darat adalah areal lahan yang digenangi air tawar secara permanen, baik buatan maupun alami. Perairan darat terdiri atas kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau/telaga/situ, dan rawa.
- k. Lahan terbuka adalah areal lahan yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak digarap karena tidak subur (tanah tandus), menjadi tidak subur setelah digarap atau ditambang tanahnya (tanah rusak), atau karena dibuka sementara (land clearing).
- l. Lain-lain adalah areal lahan yang digunakan bagi prasarana seperti jalan, sungai, dan bendungan serta saluran yang merupakan buatan manusia atau alami.

Permukiman di suatu desa memiliki pola yang berbeda dengan permukiman di kota. Di setiap daerah permukiman desa memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduknya. Mereka bersifat agraris dan mengikuti alam. Misalnya jika letak

permukiman mereka dekat dengan sungai, maka mata pencaharian penduduknya akan lebih banyak menjadi nelayan. Sedangkan jika letak permukiman memiliki banyak potensi sawah dan ladang seperti Desa Bejiharjo, penduduknya akan lebih banyak bekerja sebagai petani. Hal ini dapat mencerminkan bahwa penduduk desa lebih menggantungkan hidupnya pada potensi yang dimiliki alam.

2.3. Desa Wisata

2.3.1. Pengertian Desa Wisata

Menurut Fred Lawson 1996, *holiday villages* adalah “*centres of accomodation, usually planned as self-contained resort, with extensive opportunities for sport and recreation in an attractive natural or created setting*”. Desa wisata adalah pusat akomodasi, biasanya direncanakan sebagai resort tunggal, dengan fasilitas pendukung olahraga dan rekreasi di dalam lingkungan alami maupun lingkungan buatan.

Menurut Wiendu Nuryanti (1993) desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, desa wisata adalah suatu pusat akomodasi yang memiliki suatu atraksi dan fasilitas pendukung seperti olahraga dan rekreasi yang berkesinambungan dengan struktur kehidupan masyarakat di dalam lingkungan alami maupun buatan.

2.3.2. Prinsip Dasar Pengembangan Desa Wisata

Terdapat beberapa kriteria yang diperlukan dalam desa wisata, yaitu sebagai berikut Soemarno (2010):

- a. Atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
- b. Jarak tempuh adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
- c. Besaran desa, menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
- e. Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, dan sebagainya.

Penetapan suatu desa dalam dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut Soemarno (2010) :

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Dalam Soemarno (2010) untuk memperkaya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di suatu desa wisata, dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut :

- a. *Eco-lodge* : Renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan, atau membangun *guest house* berupa, *bamboo house*, *traditional house*, *log house*, dan lain sebagainya.
- b. *Eco-recreation* : Kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, memancing ikan di kolam, jalan-jalan di desa (*hiking*), *biking* di desa dan lain sebagainya.

- c. *Eco-education*: Mendidik wisatawan mengenai pendidikan lingkungan dan memperkenalkan flora dan fauna yang ada di desa yang bersangkutan.
- d. *Eco-research* : Meneliti flora dan fauna yang ada di desa, dan mengembangkan produk yang dihasilkan di desa, serta meneliti keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa tersebut, dan sebagainya.
- e. *Eco-energy* : Membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air untuk *Eco-lodge*.
- f. *Eco-development* : Menanam jenis-jenis pohon yang buahnya untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman obat, dll, agar bertambah populasinya.
- g. *Eco-promotion* : Promosi lewat media cetak atau elektronik, dengan mengundang wartawan untuk meliput mempromosikan kegiatan desa wisata.

Desa wisata dibentuk dengan memikirkan berbagai aspek penting seperti akses, fasilitas yang ada, potensi desa itu sendiri, maupun kondisi warga desanya. Jika aspek-aspek tersebut dinyatakan mendukung, maka desa wisata itu akan berlangsung dengan baik dan berkembang. Masing-masing desa wisata juga memiliki potensi yang diunggulkan seperti Desa Wisata Bejiharjo mengunggulkan penggabungan potensi wisata alam yang dimiliki dengan potensi kebudayaan yang ada.

2.3.3. Manfaat Pembangunan Desa Wisata

Dalam Soemarno (2010) pembangunan desa wisata akan menimbulkan berbagai manfaat dari berbagai bidang, antara lain sebagai berikut :

- a. Ekonomi : Meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal.
- b. Sosial : Membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di desa.
- c. Politik :
 - Internasional : Menjembatani perdamaian antar bangsa di dunia.
 - Nasional : Memperkokoh persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi
- d. Pendidikan : Memperluas wawasan dan cara berfikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat.
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) : Meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan.
- f. Sosial budaya : Menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hampir punah untuk dilestarikan kembali.
- g. Lingkungan : Menggugah sadar lingkungan (Darling), yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan

melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang.

Pembangunan desa wisata menimbulkan manfaat di berbagai aspek seperti peningkatan perekonomian warga desa, pengenalan kepada masyarakat luas akan keindahan alam dan budaya yang dimiliki, meningkatkan kesadaran warga dan masyarakat luar akan pentingnya alam, lingkungan, dan budaya. Hal inilah yang menyebabkan tergugahnya warga desa Bejiharjo menjadikan desanya menjadi sebuah desa wisata.

2.3.4. Tipe Desa Wisata

Dalam Soemarno (2010) menurut pola, proses, dan tipe pengelolanya desa atau kampung wisata di Indonesia sendiri terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

a. Tipe terstruktur (*enclave*)

Tipe terstruktur ini ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut :

- Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkan sehingga mampu menembus pasar internasional.
- Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.

- Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi, sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk menangkap servis-servis dari hotel-hotel berbintang lima.

b. Tipe terbuka (*spontaneus*)

Tipe terbuka ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan.

Desa wisata secara umum digolongkan menjadi dua tipe yaitu terbuka dan tertutup yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Desa Bejiharjo lebih mengarah pada tipe terbuka yang tumbuh bersama dengan struktur masyarakatnya dan perubahan desa wisata tersebut akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Sedangkan tipe tertutup dengan lokasi yang dibatasi perubahan akan sulit dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Desa wisata tersebut tidak dapat langsung dikelola sendiri oleh masyarakat desa.

2.4. Tata Ruang

2.4.1. Ruang / Space

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang / *space* merupakan suatu yang lebih dari bentuk fisik tiga dimensi, pada waktu dan dalam konteks yang berbeda. Pada dasarnya berurusan dengan berbagai jenis ruang dan fungsi mereka adalah masalah penting dalam desain. (Rapoport, 1977)

Pada dasarnya ruang yang diciptakan oleh manusia akibat dari adanya aktivitas dan perilaku yang terjadi baik memiliki batasan yang jelas secara fisik ataupun tidak. Trancik, 1986 membagi ruang / *space* ke dalam dua jenis, yaitu *hard space* dan *soft space*.

- a. *Hard space* lebih dibatasi oleh dinding arsitektur, hal ini sering dimaksudkan sebagai tempat pertemuan untuk kegiatan sosial.

Ada tiga komponen penting dari kesuksesan hard urban space, yaitu :

- *The three dimensional frame*, maksudnya adalah mendefinisikan tepi ruang, ketinggian bangunan, dan karakteristik dinding spasial. Transparansi, bukaan dan ornamen permukaan memiliki dampak signifikan pada

karakter ruang, seperti halnya hubungan antara massa vertikal dan horisontal.

- *The two dimensional pattern*, mengacu pada pemeliharaan dan artikulasi pada bidang atau lahan, seperti material, tekstur dan komposisi.
- *The placement of object in space*, lebih kepada penempatan benda-benda seperti air mancur, patung, pohon yang dapat memberi aksen atau focal point pada ruang tersebut dan dapat membuat ruang berkesan.

Hal penting yang dapat membuat ketiga komponen tersebut berhasil adalah manusia itu sendiri yang menggunakan ruang, yang dapat membuat ruang menjadi hidup.

- b. *Soft space*, didominasi oleh lingkungan alam. Dalam lingkup kota hal ini termasuk taman, kebun, maupun jalur hijau pada jalan yang dapat memberikan celah pada masyarakat untuk berekreasi.

Dalam konteks ruang yang lebih luas selain yang disebutkan di atas, ada dua hal makna ruang yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. Makna ruang berdasarkan penggunaan dan tujuan seperti yang didefinisikan oleh kebutuhan psikologis dan sosial dari individu
- b. Makna ruang berdasarkan hubungan antar ruang tertentu dan karakteristik daerah mereka termasuk sejarah dan tradisi lokal di dalamnya.

Dari teori ruang di atas dapat ditarik pemahaman ruang merupakan wadah yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang digunakan untuk aktivitas manusia baik memiliki batasan jelas secara fisik maupun tidak. Kamar tidur yang memiliki batasan fisik merupakan ruang berdasarkan fungsinya digunakan sebagai wadah manusia untuk beristirahat, sedangkan taman yang tidak memiliki batasan fisik yang jelas tetap memiliki fungsinya sebagai pemenuhan aktivitas manusia.

2.4.2. Urban Spatial Design

Terdapat tiga pendekatan teori *urban-design* menurut Trancik, 1986. Pendekatan-pendekatan tersebut berbeda satu sama lain, namun jika digunakan bersama-sama akan memberikan strategi yang baik dalam *urban-design*. Tiga pendekatan teori *urban-design* tersebut adalah :

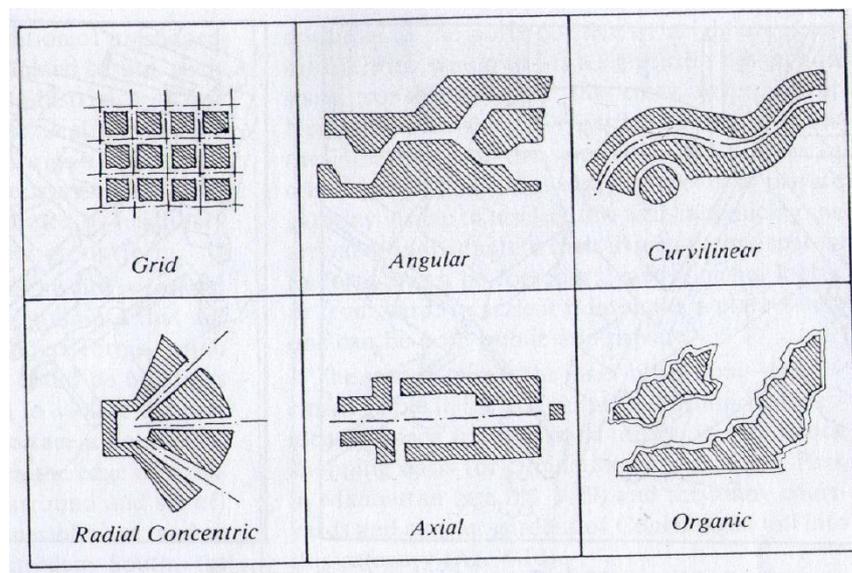
a. Figure-ground theory

Digunakan sebagai studi lahan bangunan sebagai massa yang solid “*figure*” untuk membuka void “*ground*”. Setiap lingkungan memiliki bentuk pola solid dan void, dan melalui figure-ground dapat dilakukan upaya untuk memanipulasi bentuk tersebut dengan menambah, mengurangi, atau mengubah bentuk pola fisik lingkungan untuk mencapai desain tata ruang yang lebih baik.

Soild-void tersebut menciptakan pola perkotaan, yang sering disebut dengan jaringan, dan diselingi oleh bangunan dan ruang seperti landmark atau ruang terbuka yang dapat menjadi focal point pada kawasan.

Figure-ground theory merupakan alat grafis untuk menggambarkan hubungan massa dan ruang terbuka dalam bentuk dua dimensi yang menjelaskan struktur dan tatanan ruang perkotaan.

Hubungan solid-void terbentuk dari bentuk dan lokasi bangunan, desain dari elemen tapak (tanaman, dinding), dan pergerakan yang terjadi menghasilkan enam pola tipologi solid-void, yaitu grid, angular, curvilinear, radial/concentric, axial, dan organik. Tipe-tipe tersebut berkontribusi pada desain dan persepsi ruang publik.



GAMBAR 2.1 Six Typological Patterns of Solids and Voids
(Sumber : Trancik, 1986)

b. Linkage theory

Linkage berasal dari “garis” yang menghubungkan satu elemen dengan elemen yang lain. Garis ini terbentuk dari jalan, trotoar, ruang terbuka linear, atau elemen lainnya yang secara fisik

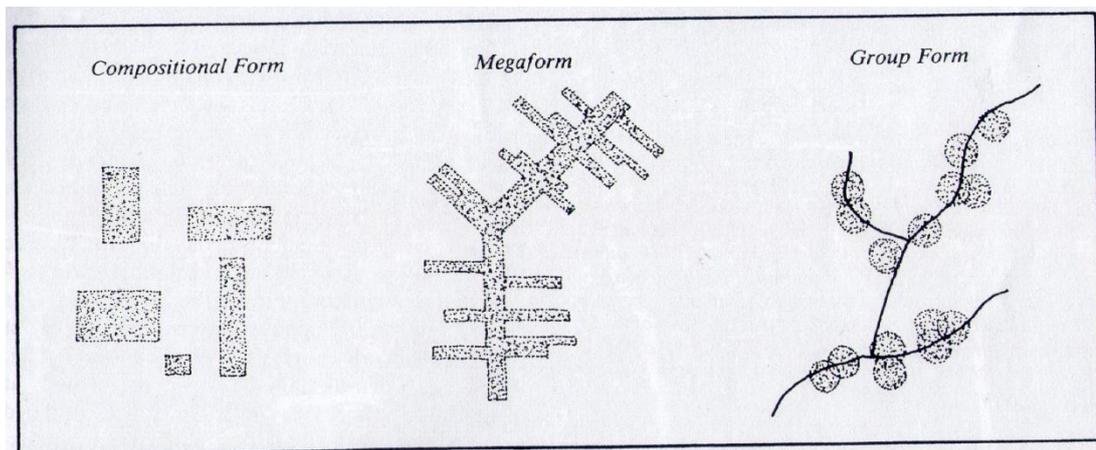
menghubungkan bagian kota. *Linkage theory* ini biasanya digunakan untuk mengatur sistem jaringan yang menetapkan struktur dalam penempatan ruang.

Dalam konteks urban design, linkage menunjukkan adanya suatu hubungan dari aktivitas yang terjadi pada beberapa bagian zona baik makro maupun mikro, dengan atau tanpa aspek fisik, sejarah, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Maki dalam Trancik 1986, linkage secara sederhana merupakan perekat dari suatu kota. Maksudnya adalah suatu kegiatan yang menyatukan semua lapisan aktivitas dan menghasilkan bentuk fisik dalam kota. Terdapat tiga tipe *urban space*, yaitu :

- *Compositional form*, yaitu bentuk ruang perkotaan yang memiliki komposisi bangunan yang nampak dalam dua dimensi. Dalam bentuk ini, hubungan spasial secara tersirat dan merupakan khas dari metode perencanaan fungsionalis.
- *Megaform*, dalam bentuk ruang perkotaan ini setiap komponen kawasan diintegrasikan ke dalam kerangka atau susunan yang lebih besar berdasarkan sistem hirarki, terbuka, dan saling berhubungan.
- *Group form*, tipe ini terbentuk secara alami dan digunakan untuk meningkatkan karakteristik kawasan dengan penggunaan material yang konsisten, dan responsif

terhadap topografi, skala manusia, dan adanya *sequence* dari bentukan kota yang didefinisikan dalam massa bangunan dinding, pintu gerbang, dan menara.



GAMBAR 2.2 Three types of spatial linkages
(Sumber : Trancik, 1986)

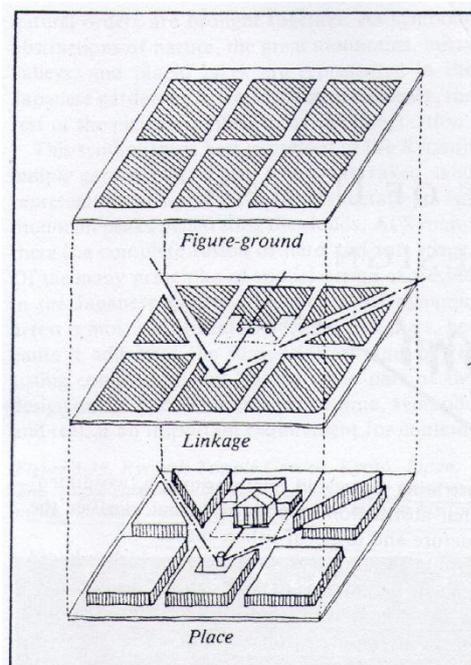
c. Place theory

Place theory merupakan perpaduan antara manusia, budaya, sejarah, dan lingkungan alam. Esensi dari teori ini dalam *spatial design* terletak dalam pemahaman karakteristik antara budaya dan manusia dari ruang fisik. Ruang / *space* akan menjadi *place* ketika telah diberikan makna kontekstual yang berasal dari budaya manusia. Setiap *place* memiliki keunikan tertentu, bergantung pada karakter lingkungannya. Karakter ini terdiri dari benda padat yang mengandung bahan material, bentuk, warna, tekstur serta nilai-nilai kultural yang tidak nampak.

Masyarakat membutuhkan suatu pengaturan *place* yang relatif stabil untuk tumbuh berkembang bersama lingkungan sosial dan budayanya. Kebutuhan ini menjadikan ruang memiliki nilai

emosional, dan batas menjadi sangat penting untuk mendukung nilai-nilai ini.

Masing-masing pendekatan memiliki nilai sendiri, namun dapat menjadi optimal jika ketiga pendekatan tersebut digunakan. Hal ini dapat memberikan struktur pada solid dan void, mengatur hubungan antar elemen, dan menanggapi kebutuhan manusia dan elemen unik dari lingkungan tertentu. Tata ruang fisik dari lanskap perkotaan harus dirancang sedemikian rupa dalam menanggapi teori-teori terkait. Sedangkan tata ruang fisik dari pedesaan secara umum berkembang dengan sendiri secara organik. Namun pendekatan-pendekatan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam suatu permukiman meskipun pada pedesaan.



GAMBAR 2.3 *Diagram of Urban Design Theories*
(Sumber : Trancik, 1986)

2.4.3. Urban Structure

Pada masa sebelum Revolusi Industri, sebagian besar kota-kota di luar dunia Barat dibentuk oleh tradisi yang disusun secara organik, yang menggunakan standar-standar perencanaan kota yang mengutamakan faktor organik sebagai hasil pandang mereka yang bersifat tradisional. Kota-kota yang dibangun dengan cara demikian disebut dengan kota tumbuh (*growth city*) dan kota itu sendiri atau kebanyakan kawasan dari kota tersebut dibangun dalam suatu proses tanpa memperhatikan perancangan secara keseluruhan. Struktur kota ini sangat dipengaruhi oleh proses pembangunan sehingga yang menjadi tujuan dari rencana tersebut terhadap pembangunan kota dianggap tidak penting. Oleh sebab itu, pembangunan kota tidak akan diatur sebelum adanya pembangunan karena kota dianggap akan berkembang secara organik, ilmiah sesuai kebutuhan masyarakatnya (Kostof, 1991).

Setelah terjadinya Revolusi Industri kebanyakan kota di dunia Barat dirancang dalam tradisi yang menyusun kota secara teknis, dirancang dengan standar yang mengutamakan faktor geometri sebagai hasil pengetahuan yang bersifat teknis dan teoritis. Kota-kota yang dibangun dengan cara demikian disebut sebagai kota terencana (*planned city*). Kota itu secara keseluruhan atau beberapa kawasan besar dari kota tersebut dibangun dengan perencanaan tertentu yang lengkap secara geometris. Struktur kota demikian sangat dipengaruhi oleh suatu tujuan dan rencana tertentu sehingga proses yang terjadi pada pembangunan

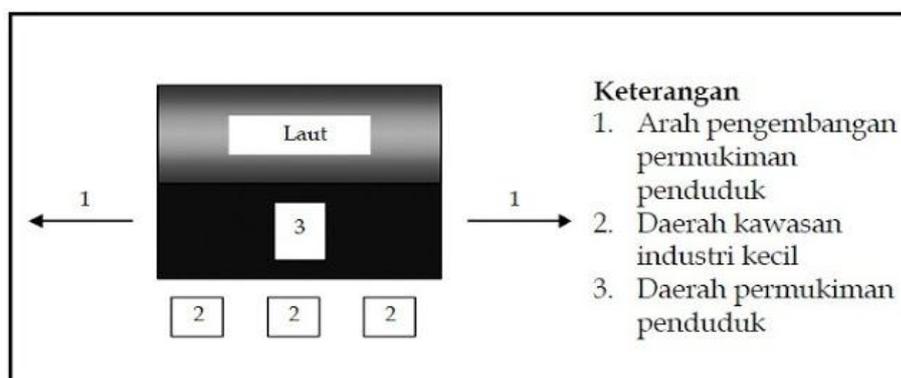
kota ini tidak penting karena sebelumnya semua telah diatur dan diarahkan perencanaannya (Kostof, 1991).

Pola struktur tersebut tidak hanya terjadi di kota, pola struktur tersebut juga terjadi pada permukiman di desa. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk tersebut lebih sederhana daripada bentuk pola permukiman kota.

Menurut Daldjoeni (1987), bentuk-bentuk desa secara sederhana dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Bentuk desa menyusur sepanjang pantai

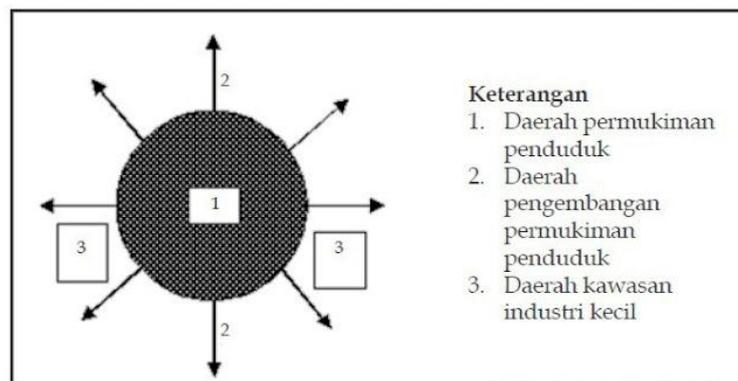
Di daerah-daerah pantai yang landai dapat tumbuh suatu permukiman, yang mata pencaharian penduduknya di bidang perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Jika desa pantai seperti itu berkembang, maka tempat tinggal meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai, sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Adapun pusat-pusat kegiatan industry kecil (perikanan dan pertanian) tetap dipertahankan di dekat tempat tinggal penduduk yang mula-mula.



GAMBAR 2.4 Bentuk desa menyusur sepanjang pantai
(Sumber : Daldjoeni, 1987)

b. Bentuk desa yang terpusat

Ini kepadatan di daerah pegunungan. Penduduk umumnya terdiri atas mereka yang seketurunan; pemusatan tempat tinggal tersebut didorong oleh kegotongroyongan mereka; jika jumlah penduduk kemudian bertambah lalu pemekaran desa pegunungan itu mengarah ke segala jurusan, tanpa adanya rencana. Sementara itu pusat-pusat kegiatan penduduk pun dapat bergeser mengikuti pemekaran.



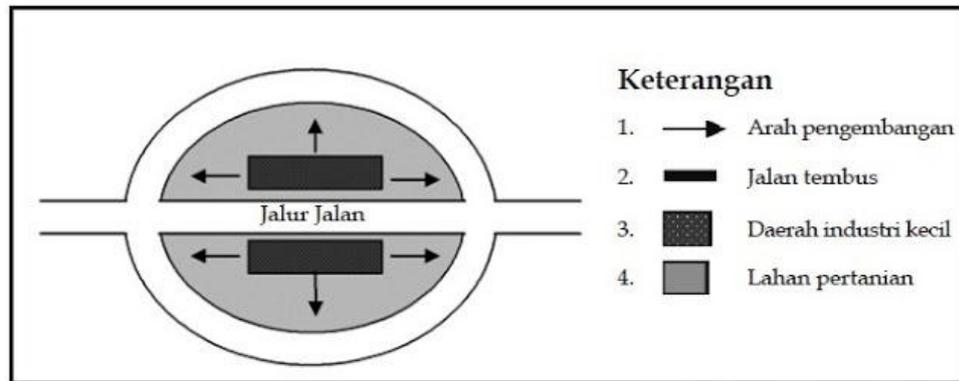
GAMBAR 2.5 Bentuk desa terpusat

(Sumber : Daldjoeni, 1987)

c. Bentuk desa linier di dataran rendah

Pemukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Jika kemudian secara wajar artinya tanpa direncanakan desa mekar, tanah pertanian diluar desa sepanjang jalan raya menjadi pemukiman baru. Memang ada kalanya juga pemekaran ke arah pedalaman sebelah menyebelah jalan raya. Maka kemudian harus dibuatkan jalan baru mengelilingi desa, jadi

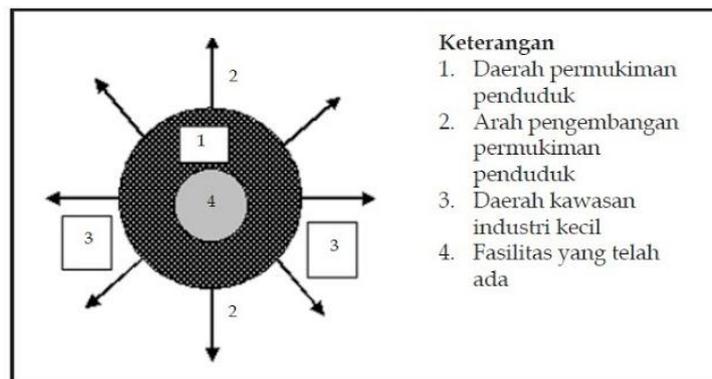
semacam ring road dengan maksud agar kawasan pemukiman baru tak terpencil.



GAMBAR 2.6 Bentuk desa linier
(Sumber : Daldjoeni, 1987)

d. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu

Bentuk desa tersebut terdapat di dataran rendah. Yang dimaksudkan dengan fasilitas misalnya mata air, waduk, lapangan terbang, dan lain-lain. Arah pemekarannya dapat ke segala jurusan, sedang fasilitas-fasilitas untuk industri kecil dapat disebarakan dimana-mana sesuai dengan keinginan setempat.



GAMBAR 2.7 Bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu
(Sumber : Daldjoeni, 1987)

Menurut Bintarto (1983), pola permukiman desa adalah sebagai berikut:

- a. Memanjang jalan
- b. Memanjang sungai
- c. Radial, misalnya mengelilingi danau
- d. Tersebar, mengikuti pola tersebarnya air tanah
- e. Memanjang pantai
- f. Memanjang jalan kereta api

Menurut Alvin L. Bertrand (1978) pola perkampungan yang sesuai dengan pola perkampungan di Yogyakarta, yaitu :

- a. Pola perkampungan yang penduduknya hidup dan tinggal secara menggerombol membentuk suatu kelompok yang disebut nucleus (*The Nucleated Agricultural Village Community*)
- b. Pola perkampungan yang penduduknya tinggal mengelompok di sepanjang jalur sungai atau jalur lalu lintas yang membentuk sederetan perumahan (*The Line Village Community*)
- c. Pola perkampungan yang penduduknya tinggal menyebar di suatu daerah pertanian (*The Open Country*)

Pola permukiman pedesaan lebih sederhana jika dibandingkan dengan permukiman perkotaan. Pola permukiman pedesaan berkembang secara alami berdasarkan potensi alam yang ada disekitarnya seperti berkembang mengikuti pola jalan lingkungan yang ada, mengikuti pola sungai maupun fasilitas-fasilitas yang ada. Dengan mengikuti potensi alam

yang ada dapat memberikan keuntungan dan kemudahan tersendiri bagi keberlangsungan masyarakatnya.

2.5. Guna Lahan

2.5.1. Pengertian Guna Lahan

Pengertian lahan menurut Jayadinata (1999) merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh perorangan atau lembaga untuk dapat diusahakan. Menurut Purwowidodo (1983) lahan mempunyai pengertian suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan.

Menurut Chapin dan Kaiser (1979) kebutuhan penggunaan lahan dalam struktur tata ruang kota/wilayah berkaitan dengan 3 sistem yang ada, yaitu :

- a. Sistem kegiatan, manusia dan kelembagaannya untuk memenuhi kebutuhannya yang berinteraksi dalam waktu dan ruang.
- b. Sistem pengembangan lahan yang berfokus untuk kebutuhan manusia dalam aktivitas kehidupan.
- c. Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik dengan air, udara dan material.

Pengertian lahan dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi fisik geografi, lahan adalah tempat dimana sebuah hunian mempunyai kualitas fisik yang penting dalam penggunaannya. Sementara

ditinjau dari segi ekonomi lahan adalah suatu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam produksi (Lichfield dan Drabkin, 1980).

Lahan merupakan suatu area yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan berbagai kegunaannya. Lahan ada yang memiliki potensi sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia atau lahan yang hanya dapat difungsikan sebagai bertempat tinggal.

2.5.2. Jenis Penggunaan Lahan

Lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam). Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu wilayah, maka perlu diketahui komponen komponen penggunaan lahannya.

Menurut Maurice Yeates (1980), komponen penggunaan lahan suatu wilayah terdiri atas:

- a. Permukiman
- b. Industri
- c. Komersial
- d. Jalan

- e. Tanah publik
- f. Tanah kosong

Sedangkan menurut Hartshorn (1980), komponen penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi:

- a. *Private Uses*, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan permukiman, komersial, dan industri.
- b. *Public Uses*, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan rekreasi dan pendidikan.
- c. Jalan

Adapun penjelasan masing masing guna lahan berdasarkan Chapin dan Kaiser (1979) adalah:

- a. Guna lahan komersial

Fungsi komersial dapat dikombinasikan dengan perumahan melalui percampuran secara vertikal. Guna lahan komersial yang harus dihindari dari perumahan adalah perdagangan grosir dan perusahaan besar.

- b. Guna lahan industri

Keberadaan industri tidak saja dapat memberikan kesempatan kerja namun juga memberikan nilai tambah melalui *landscape* dan bangunan yang megah yang ditampilkannya. Jenis industri yang harus dihindari dari perumahan adalah industri pengolahan minyak, industri kimia, pabrik baja dan industri pengolahan hasil tambang.

c. Guna lahan publik maupun semi publik

Guna lahan ini meliputi guna lahan untuk pemadam kebakaran, tempat ibadah, sekolah, area rekreasi, kuburan, rumah sakit, terminal dan lain-lain.

Dari teori di atas dapat dipahami bahwa lahan memiliki macam-macam kegunaan dari kebutuhan privat hingga publik, dari milik pribadi hingga pemerintah. Pada perkotaan macam guna lahan lebih banyak daripada pedesaan. Pada pedesaan seperti Desa Bejiharjo guna lahan sebagian besar sebagai area permukiman dan pertanian. Jika ada lahan yang digunakan sebagai industri tidak akan sebesar dan berkelompok seperti yang ada di perkotaan.

2.5.3. Perubahan Guna Lahan

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana, merupakan gejala umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan pemanfaatan lahan dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana dengan pertimbangan pelaku pasar (Zulkaidi, 1999). Pengertian pemanfaatan atau dialih fungsi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sebidang lahan dari satu pemanfaatan ke pemanfaatan lainnya.

Fungsi perubahan lahan biasanya paling sering mengalami proses perubahan fungsi kawasan terutama dari fungsi perumahan ke fungsi baru, perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Bourne 1971):

- a. Penetrasi yaitu terjadinya penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen.
- b. Invasi yaitu terjadinya serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tetapi belum melalui fungsi lama.
- c. Dominasi yaitu terjadinya perubahan dominan proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru.
- d. Suksesi yaitu pergantian selama satu kali dari suatu fungsi lama ke fungsi baru.

Pergantian fungsi lahan dari perumahan menjadi kegiatan perdagangan banyak terjadi di ruas-ruas jalan utama di kota disebabkan tingginya pergerakan penduduk, sehingga memiliki potensi sebagai daya tarik konsumen dan dianggap sebagai kawasan penetrasi kegiatan komersil yang potensial. Perubahan penggunaan lahan merupakan gejala yang normal sesuai dengan proses perkembangan dan pengembangan wilayah atau kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Berikut ini adalah pengertian mengenai pertumbuhan dan transformasi menurut Doxiadis (1968), yaitu :

- a. Pertumbuhan yaitu mencakup semua jenis pemukiman baru termasuk di dalamnya pemukiman yang sama sekali baru dan perluasan pemukiman yang ada.
- b. Transformasi yaitu perubahan terus menerus bagian-bagian pemukiman perkotaan dan pedesaan untuk meningkatkan nilai

dan tingkat efisiensi bagian penghuninya. Transformasi adalah proses yang sangat normal karena merupakan bentuk pengembangan yang lebih umum di bandingkan perluasannya, perluasan hanya terjadi satu kali, sementara transformasi dapat terjadi berkali-kali.

Pola perubahan lahan cenderung membutuhkan suatu pengorganisasian dalam pengurusannya. Kerumitan yang tinggi membutuhkan juga usaha yang terus menerus dalam menganalisa informasi dan perencanaan dalam menghadapi segala kemungkinannya, disaat kehidupan yang semakin dinamis menimbulkan kekuatan hubungan sosiopolitik. (Rosenau,1990)

Perubahan lahan tidak hanya meningkatkan berubahnya tingkat sosial dan teknologi tetapi juga menurunkan kemampuan perencana dalam memprediksikan perubahan lahan tersebut (Rosenau 1990). Identifikasi karakteristik terhadap pola perubahan lahan yaitu (Morley 1986), yaitu:

- a. Percepatan tingkat perubahan lahan
- b. Peningkatan gangguan atau pergeseran terhadap suatu kondisi
- c. Peningkatan yang terhadap kejadian yang tidak bisa diprediksi
- d. Krisis yang berkelanjutan
- e. Sering terjadi konfrontasi dengan berbagai masalah yang begitu kompleks sehingga mempersulit untuk mencapai suatu perencanaan yang melibatkan banyak campur tangan

- f. Peningkatan waktu yang terbuang dalam menghadapi suatu akibat yang tidak dapat diantisipasi berdasarkan tindakan yang telah dilakukan.

Menurut Chapin dan Kaiser perubahan guna lahan juga dapat terjadi karena pengaruh perencanaan guna lahan setempat yang merupakan rencana dan kebijakan guna lahan untuk masa mendatang, proyek pembangunan, program perbaikan pendapatan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dari pernerintah daerah. Perubahan guna lahan juga terjadi karena kegagalan mempertemukan aspek dan politis dalam suatu manajemen perubahan guna lahan.

Terjadinya suatu proses perubahan guna lahan disebabkan oleh banyak faktor, seperti terjadi karena keinginan pasar sehingga tidak sesuai dengan rencana semula, atau terpengaruh oleh unsur-unsur baru dari lingkungan luas seperti yang sedang banyak terjadi pada area pedesaan. Banyak pedesaan yang berubah menjadi desa wisata, adanya fungsi baru (komersial) yang masuk ke dalam fungsi homogen yang ada(bermukim).

Perubahan guna lahan adalah interaksi yang disebabkan oleh tiga komponen pembentuk guna lahan, yaitu sistem pembangunan, sistem aktivitas dan sistem lingkungan hidup. Pembangunan yang terjadi disesuaikan dengan permintaan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk melakukan suatu aktivitas dengan memikirkan aspek lingkungan.

2.6. Morfologi

2.6.1. Pengertian Morfologi

Karya arsitektur merupakan salah satu refleksi dan perwujudan kehidupan dasar masyarakat, memuat sejumlah makna yang dapat dikomunikasikan (Rapoport, 1969). Keseragaman dan keberagaman sebagai ungkapan perwujudan fisik yang terbentuk yaitu citra dalam arti identitas akan memberikan makna sebagai pembentuk citra suatu tempat (*place*). Untuk memahami makna tersebut ada tiga komponen struktural yang dapat dikaji menurut Schulz (1988), yaitu :

- a. Topologi menyangkut tatanan sosial (*spacial order*) dan pengorganisasian ruang (*spacial organization*) yang dalam hal ini menyangkut ruang (*space*) berkaitan dengan tempat (*place*) yang abstrak.
- b. Morfologi menyangkut kualitas spasial figural dan konteks wujud pembentuk ruang yang dapat dibaca melalui pola, hirarki, dan hubungan ruang satu dengan yang lainnya.
- c. Tipologi lebih menekankan pada konsep dan konsistensi yang dapat memudahkan masyarakat mengenal bagian-bagian arsitektur.

Kata morfologi terdiri dari dua suku kata yaitu *morf* yang berarti bentuk dan *logos* yang berarti ilmu. Secara sederhana morfologi kota berarti ilmu yang mempelajari produk bentuk-bentuk fisik kota secara logis. Morfologi merupakan pendekatan dalam memahami bentuk logis

sebuah kota sebagai produk perubahan *sosio-spatial*. Hal ini disebabkan karena setiap karakteristik *sosio-spatial* di setiap tempat berbeda-beda.

Dari pengertian di atas morfologi merupakan salah satu komponen struktural dalam pemahaman makna sebagai pembentuk citra suatu tempat (*place*). Morfologi membahas mengenai bentuk fisik suatu tempat yang dapat dibaca melalui pola, hirarki, dan hubungan ruang satu dengan yang lainnya.

2.6.2. Morfologi Kota

Menurut Herbert (1973) lingkup kajian morfologi kota ditekankan pada bentuk-bentuk fisik dari lingkungan kekotaan yang dapat diamati dari kenampakannya, yaitu meliputi unsur :

- a. Sistem jalan-jalan yang ada
- b. Blok-blok bangunan baik daerah hunian ataupun bukan (perdagangan/industri)
- c. Bangunan-bangunan individual

Sedangkan menurut Smailes (1955), menekankan lingkup kajian morfologi meliputi :

- a. Penggunaan lahan (*land use*)
- b. Pola-pola jalan (*street*)
- c. Tipe-tipe bangunan (*architectural style of buildings & their design*)

Morfologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk kota dan kawasan. Morfologi tersebut dapat menciptakan suatu

karakteristik tertentu sehingga membentuk citra dalam arti identitas akan memberikan makna sebagai pembentuk citra suatu tempat (*place*). Namun untuk memahami makna suatu tempat itu tidak hanya menjelaskan melalui morfologi saja, namun juga melalui komponen struktural lainnya seperti tipologi dan topologi.

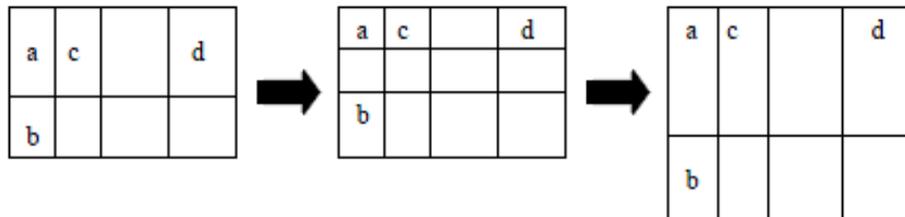
Morfologi tidak hanya dapat digunakan untuk mempelajari bentuk perkotaan, namun juga pedesaan seperti Desa Bejiharjo. Untuk mempermudah dalam mengkaji morfologi tersebut, dapat diamati melalui pembagian lingkup yaitu blok-blok bangunan, penggunaan lahan, jalan, serta tipe bangunannya.

2.6.3. Morfologi Ruang

Morfologi lebih menekankan pada pembahasan bentuk geometrik, sehingga untuk memberi makna pada ungkapan ruangnya harus dikaitkan dengan nilai ruang tertentu. Nilai ruang saling berkaitan dengan organisasi ruang, hubungan ruang, dan bentuk ruang. Nilai ruang yang disebabkan hirarki ruang karena adanya perbedaan bentuk maupun ruangnya yang menunjukkan adanya derajat kepentingan baik secara fungsional, formal, maupun simbolik. Sistem tata nilai ruang bisa tercipta dengan adanya besaran atau ukuran yang berbeda, bentuk yang unik dan lokasi. (Ching, 1979)

Morfologi bentuk tidak lepas dari transformasi. Darer (dalam Steadman, 1983) mencontohkan dengan bentuk persegi panjang mentransformasi bidang-bidang yang terdapat di dalamnya hingga

membentuk suatu pola baru namun masih dalam jenis yang saling berkaitan.



GAMBAR 2.8 Bentuk hasil transformasi
(Sumber : Steadman, 1983)

Perubahan atau transformasi penggunaan ruang dalam hunian dapat diidentifikasi dalam tiga kategori menurut Hall dalam Lang, 1987 yaitu :

- a. *Fixed-feature space*, yaitu suatu ruang yang dibatasi dengan elemen dan tidak mudah mengalami perubahan
- b. *Semifixed-feature space*, yaitu suatu ruang terdapat perabot dan dinding pemisah yang mudah dipindah sesuai kebutuhan.
- c. *Informal space*, yaitu terjadi perubahan terhadap fixed dan semi fixed feature space serta melibatkan lebih banyak manusia di dalamnya terhadap fungsi ruang yang telah ditentukan. Akibatnya adalah pengawasan akan fungsi ruang tersebut tidak akan maksimal.

Dengan adanya transformasi dalam penggunaan ruang, hal ini menyebabkan terjadinya penyesuaian perilaku manusia terhadap perubahan tersebut. Menurut Turner, 1972 terdapat dua jenis penyesuaian perilaku manusia tersebut, yaitu :

- a. *Housing adaptation*, yaitu usaha penghuni dalam menyesuaikan perilakunya, sebagai tanggapan atas kebutuhan ruang untuk melakukan aktifitas pada rumahnya. Hal ini disebut “bersifat pasif”.
- b. *Housing adjustment*, yaitu usaha memenuhi kebutuhan, ketika penghuni merasakan kekurangan ruang untuk beraktifitas pada rumahnya. Bentuk tindakannya dapat berupa pindah rumah, pengubahan atau melakukan penambahan ruang terhadap rumahnya, agar tingkat privasi lebih dapat tercapai.

Dari teori morfologi ruang tersebut dapat dipahami bahwa pembahasan berkaitan dengan bentuk ruang yang saling berkaitan dengan organisasi ruang, hubungan ruang. Morfologi bentuk tidak terlepas dari transformasi. Transformasi tersebut mempengaruhi perilaku manusia dalam menyesuaikan dalam penggunaan ruang. Hal ini dapat bersikap pasif dan aktif seperti warga yang ada pada Desa Bejiharjo. Penghuni melakukan penambahan ruang atau penggandaan fungsi ruang yang disesuaikan dengan aktivitas yang terjadi.

2.7. Grand Concept

Penelitian ini fokus membahas mengenai pengaruh aktivitas wisata terhadap tata ruang desa. Dalam hal ini studi kasus dilakukan pada Desa Wisata Bejiharjo, Yogyakarta terutama pada Dusun Glaran I dan Dusun Bulu. Dari kajian pustaka tersebut, penulis menginterpretasikan

bahwa aktivitas wisata disini adalah aktivitas desa wisata yang merupakan suatu pusat akomodasi yang memiliki suatu atraksi dan fasilitas pendukung seperti olahraga dan rekreasi yang berkesinambungan dengan struktur kehidupan masyarakat di dalam lingkungan alami maupun buatan. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kehidupan masyarakat desa.

Aktivitas desa wisata ini dapat mempengaruhi tata ruang desa. Tata ruang desa ini terdiri dari tata ruang luar dan tata ruang dalam. Tata ruang luar kawasan permukiman desa yang dapat dilihat dari aspek jalan-jalan yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain, blok-blok bangunan, fungsi masing-masing blok bangunan tersebut, serta fungsi lahan lainnya.

Sedangkan untuk tata ruang dalam lebih fokus pada ruang-ruang yang ada pada blok bangunan seperti rumah tinggal. Nilai ruang saling berkaitan dengan organisasi ruang, hubungan ruang, dan bentuk ruang. Perubahan tata ruang dalam yang terjadi menyebabkan morfologi yang tidak terlepas dari transformasi ruang itu sendiri.

Dari interpretasi kajian pustaka yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan poin-poin yang akan diteliti dari penelitian dengan judul "Pengaruh Aktivitas Penunjang Wisata Terhadap Perubahan Tata Ruang Desa (Studi Kasus : Desa Wisata Bejiharjo, Yogyakarta) adalah:

- a. Tata ruang luar adalah bentuk kawasan luar permukiman desa secara keseluruhan yang meliputi :

- Jalan-jalan lingkungan
 - Blok bangunan (*solid-void*)
 - Fungsi bangunan
 - Fungsi lahan lainnya (seperti area terbuka)
- b. Tata ruang dalam adalah bentuk pola dalam ruang rumah yang meliputi :
- Organisasi ruang
 - Hubungan ruang
 - Bentuk ruang
 - Fungsi ruang
- c. Aktivitas desa wisata adalah aktivitas yang dilakukan oleh penduduk Desa Bejiharjo sendiri dan aktivitas pengunjung yang mempengaruhi perubahan tata ruang yang terjadi. Lebih condong pada aspek sosial budaya masyarakat.

Dengan pendekatan dan poin-poin yang telah disebut di atas dapat disimpulkan bahwa tata ruang (aspek fisik) dan sosial budaya masyarakat (aspek nonfisik) merupakan *grand theory*. Dari *grand theory* tersebut kemudian diturunkan lagi dalam variabel atau parameter yang akan diverifikasikan dengan kondisi lapangan.